

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad, Mukti Fajar, dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adjie, Habib. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib. 2014. *Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2019. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andasasmita, Komar. 1984. *Notaris I*. Bandung: Sumur.
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahri, Syamsul. 2020. "Kewenangan Notaris: Sertifikasi Transaksi Elektronik (Cyber Notary)." Dalam Annalisa Y dan Agus Trisaka (Ed.), *Cyber Notary*. Palembang: Unsri Press.
- Bertens, K. 2007. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiono, Herlien. 2014. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. 2015. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Cruz, Peter de. 2014. *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*. Diterjemahkan oleh Narulita Yusron. Bandung: Nusa Media.
- Dillah, Suratman, dan Philips. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:

Alfabeta.

Diradja, Santia Dewi, dan Fauwas. 2011. *Panduan Teori dan Praktik Notaris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hizbul Maulana. 2015. *Masyarakat Indonesia Membutuhkan Notaris*. Jakarta: Primamedia.

Kansil, Christine S.T., Kansil, S.T., Palendeng, Engeli R., dan Mahamit, Godlieb N. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lumban Tobing, G.H.S. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media.

Notodisoerjo, Soegondo R. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali.

Nurita, Elok. 2012. *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.

Salim HS. 2021. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Bandung: Sinar Grafika.

Sjaifurrachman, dan Adjie, Habib. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju

Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri. 1985. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke-14. Bandung: Alfabeta.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Indonesia. Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

C. Jurnal

Abdullah, Nawaaf, dan Munsyarif Abdul Chalim. 2017. "Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik." *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Affiah, Kunni. 2017. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya." *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1.

Andini, Rizki. 2024. *Perbuatan Melawan Hukum oleh Notaris atas Pembuatan Akta yang Cacat Hukum*. Tesis. Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang.

Ayuningtyas, P. 2020. "Sanksi terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 2.

Baharudin. 2014. "Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya." *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 3.

Cahya, Kadek, dan Susila Wibawa. 2019. "Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab

- Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perspektif *Bestuurs Bevoegdheid*." *Credito*, Vol. 1, No. 1.
- Gumanti, R. 2012. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, No. 1.
- Halilah, Siti, dan Mhd. Fakhurrahman Arif. 2021. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, hlm. 56–65.
- Halipah, Gisni, dkk. 2023. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata." *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 1.
- Hasanah, Siti, dkk. 2025. "Analisis Penyebab dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 13, No. 1. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, hlm. 58–76.
- Hidayah, Nurul. 2024. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Mengandung Cacat Hukum*. Tesis. Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Padang.
- Jessica. 2021. "Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2377 K/PDT/2016)." *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 2, hlm. 338–355.
- Kamagi, Grace A. 2018. "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya." *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 5.
- Khairandy, Ridwan. 2011. "Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
- Kusumawati, L. 2005. *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Tesis. Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mido, Muhammad Tiantanik, I Nyoman Nurjaya, dan Rachmad Safa'at. 2018. "Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap." *Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Rita Alfiana. 2018. "Ambiguitas Bentuk Akta Notaris (Analisis Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)." *Lex Jurnalica*, Vol. 15, No. 3.
- Siyam, S. 2024. *Teori Keadilan John Rawls dan Relevansinya bagi Gerakan Kesetaraan Gender*. Disertasi. UIN Raden Intan Lampung.
- Suhardini, Aprilia Putri. 2018. "Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik." *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 2.
- Widyalestari, P., dan Lathifah Hanim. 2017. "Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan sebagai Arbiter Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4.

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Pdg

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 308/PDT/2023/PT PDG

E. Wawancara

Wawancara dengan Notaris Ria Satriana Armando, S.H.,M.Kn. 12 Mei 2026

Wawancara dengan Notaris Jayat, S.H., M.Kn. 13 Mei 2026

Wawancara dengan Notaris Hanafi Syahputra Harsian, S.H, 12 Mei 2026

Wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Padang yaitu Bapak Emilia Arif, S.H, 18 Mei 2026

